

# **IWO Jambi Apresiasi Polda Jambi Antisipasi Berita Hoax di Pilkada Serentak 2024**

JAMBI – Antisipasi dini Polda Jambi terhadap berita hoax di Pilkada Serentak 2024, mendapatkan apresiasi Ikatan Wartawan Online (IWO). IWO siap antisipasi hoax di Pilkada Serentak.

Hal ini disampaikan Ketua Pengurus Wilayah (PW) IWO Provinsi Jambi, Erwin Majam, Jumat (28/6/2024). Bilangnya, IWO akan kembali turun memerangi berita palsu, berita bohong atau hoax seperti pada Pilpres 2017 hingga Pilpres 2019 yang masif.

“Kita sudah turun dari dulu, ke kampus, sekolah sampai ke kecamatan dengan kolaborasi pemerintah daerah dan Polres-polres. Hari ini, kami terpanggil kembali dengan antisipasi dini Polda Jambi yang patut kita apresiasi,” katanya.

Hal ini terlihat dari kunjungan korps seragam coklat itu ke PD IWO Tanjab Timur hingga PD IWO Kerinci-Sungai Penuh baru-baru ini, terkait Pilkada Serentak.

Tentu saja, IWO merespon cepat hal ini dan langsung menggelar rapat dan menyiapkan program kerja terkait.

“Kita sudah menyusun program yang akan dirangkai dengan HUT IWO yang jatuh pada 8 Agustus. PW IWO Jambi akan turun ke PD-PD seperti Tanjabtim, Tanjabbar, Batanghari, Tebo, Kerinci-Sungai Penuh dan Sarolangun,” kata Erwin.

Lewat kegiatan tersebut, jajaran Pengurus Daerah (PD) IWO akan diperkuat untuk memerangi berita hoax yang akan muncul di Pilkada. Dimana kepentingan politik akan menciptakan munculnya berita hoax untuk menjatuhkan rival, atau strategi meningkatkan popularitas.

“Kalau dulu untuk menjatuhkan, sekarang ada pula yang

dilakukan untuk meningkatkan popularitas. Ibaratnya, memainkan simpati orang. Namun masalahnya, kredibilitas wartawan dan media yang menjadi pertarungan disini,” katanya.

IWO tak mau, anggotanya yang tersebar di 8 kabupaten/kota menjual profesinya demi rupiah atau bahkan hanya sekedar janji, dalam menciptakan hoax itu.

“Untuk itu, kita akan menegaskan profesionalitas dan menjaga netralitas dalam menghadapi pilkada. Terutama, dalam menjaga marwah organisasi yang sudah harum di Jambi, agar tidak dikotori oknum-oknum yang mengatasnamakan IWO,” tegasnya.

Penegasan ini juga mendorong seluruh pengurus dan anggota IWO di Provinsi Jambi yang berjumlah lebih dari 250 anggota, yang rentan dengan sebaran hoax di media sosial.

“Kita minta semua bergerak, jangan nanti ada oknum yang mengatasnamakan IWO, lalu mencoreng kita semua,” katanya.

Ia juga mendorong semua untuk ikut mengedukasi masyarakat terkait bahaya berita hoax. Jika ada yang menjadi korban, IWO menyerukan agar masyarakat jangan takut melapor.

“Anggota IWO harus patuh pada kode etik jurnalistik dan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan ikut mengedukasi masyarakat dan menciptakan situasi yang kondusif dengan berita-berita yang dijamin kebenarannya,” pungkasnya. (Red)

---

## **Pemkab Batang Hari Raih Apresiasi Kategori Penurunan**

# Prefalensi Stunting Tertinggi

Batang Hari, Jambi – Dalam rangka mengoptimalkan sinergi Gerak dan Langkah Keluarga Indonesia mencegah Stunting untuk mewujudkan Keluarga Berkualitas Menuju Indonesia Emas meiatul momentum Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) Ke-31 di Semarang, Jumat (28/06/2024).

Sebagaimana yang kita ketahui, peran keluarga merupakan hal yang perlu dioptimalkan dalam membentuk generasi yang berkualitas dan berkarakter Saat ini salah satu persoalan yang perlu menjadi perhatian dalam membentuk generasi yang berkualitas adalah adanya resiko stunting Mengingat sangat diperlukannya intervensi pemerintah untuk menghindarkan generasi yang akan datang dari kondisi stunting.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberikan amanat melalui Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stuning Berdasarkan Perpres tersebut, BKKBN ditugaskan sebagai koordinator pelaksanaan percepatan penurunan stunting di lapangan.

Peran keluarga harus dioptimalkan sebagai entitas utama dalam pencegahan stunting. Keluarga perlu memperhatikan periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) sangat penting dan menjadi prioritas utama, dimulai dari 270 hari masa kehamilan hingga 730 hari setelah lahir.

Hal ini membuat peran keluarga harus dioptimalkan sebagai pelopor awal dalam pencegahan stunting. Untuk mengoptimalkan peran keluarga, salah satunya dilakukan proses intervensi dalam bentuk pendampingani petugas BKKBN yang bersinergi dengan Kader PKK maupun bidan.

Di akhir acara Wakil Bupati Batang Hari selaku Ketua TPPS mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen gugus dan lapisan masyarakat yang telah melaksanakan intervensi penurunan stunting dengan baik dari 26,3 % menjadi 10,1 %

dimana Kabupaten Batang Hari berhasil mendapatkan Apresiasi 15 Kabupaten/Kota kategori penurunan prevalensi stunting tertinggi Tahun 2023. namun penanganan ini tidak terhenti sampai disini diharapkan kita semua tetap konsen dalam penanganan stunting di Kabupaten Batang Hari “ungkap wakil Bupati Batang Hari”.

Turut mendampingi Kepala Dinas PPKBP3A, Wakil Ketua TP-PKK, Tenaga ahli stunting, Tenaga PLKB Kabupaten Batang Hari. (Red)

---

## **Wabup Batang Hari Hadiri Temu Kerja TPPS di Semarang**

Batang Hari, Jambi – Wakil Bupati Batang Hari H. Bakhtiar. SP Selaku Ketua TPPS Kabupaten Batang Hari menghadiri acara temu kerja Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Semarang, Kamis (27/06/2024).

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pemerintah menargetkan prevalensi afunting menjadi 14 persen tahun 2024, melalui pencegahan dan penurunan stunting pada sasaran strategis ibu hamil dan anak berusia 0-23 bulan atau rumah tangga 1.000 HPK.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam menurunkan prevalensi stunting Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, prevalensi stunting di Indonesia mencapai 24,4%.

Angka ini berhasil diturunkan menjadi 21.6% pada tahun 2022 dan 21,5% pada tahun 2023. Meski demikian, penurunan ini masih jauh dan target yang Ingin kita capai sehingga perlu kerja ekstra untuk mencapai target prevalensi stunting sebesar 14%

pada tahun 2024.

Mengutip arahan Bapak Wakil Presiden pada rapat tim pengarah dan pelaksanaan TPPS Pusat pada bulan maret 2024, memberikan arahan untuk dilakukan analisis mengapa terjadi pelambatan penurunan prevalensi stunting pada 2 tahun terakhir.

Arahan Selanjutnya dikemukakan kembali pada rapat rakernas bangga kencana dan PPS tahun 2024, wakil presiden memberikan arahan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program, baik terkait capaian, pembelajaran maupun rekomendasi agar program yang sudah kita lakukan dapat berlanjut dan menjadi prioritas.

Dalam rangka mempercepat penurunan prevalensi stunting, arahan tersebut ditindaklanjuti dengan program Intervensi Serentak Pencegahan Stunting Program ini merupakan gerakan bersama yang melibatkan seluruh Kementerian dan Lembaga, serta TPPS Daerah dari tingkat Provinsi hingga Desa.

Melalui intervensi serentak ini bertujuan untuk meningkatkan cakupan layanan pengukuran dan deteksi dini masalah gizi, serta memberikan intervensi yang tepat sasaran dan efektif.

Dalam melakukan percepatan, pendekatan multi sektor di berbagai tingkatan pemerintahan menjadi poin kunci, oleh karena itu Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang telah terbentuk di seluruh tingkatan pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan harus kerja bersama secara gotong royong untuk meningkatkan cakupan pengukuran dan penimbangan catin, baduta/balita di posyandu.

TPPS memiliki peranan yang penting dalam upaya percepatan penurunan stunting di Indonesia. BKKBN bersama Kementerian Dalam Negeri harus senantiasa melakukan pembinaan, memotivasi, dan menggerakkan tim ini agar selalu konsisten dan berkesinambungan dalam melakukan upaya-upaya penurunan stunting sesuai dengan peranannya masing-masing.

Disamping peranan TPPS, begitu banyak pihak lain yang mendukung keberhasilan pelaksanaan Program Bangga Kencana. Bertepatan dengan momen Hari Keluarga Nasional, BKKBN bekerjasama dengan berbagai pihak.

Mengambil momentum untuk mengisi momen Hari Keluarga Nasional tersebut untuk melakukan penguatan TPPS dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting sekaligus sebagai ajang praktik baik antar TPPS di tingkatan kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan.

Kegiatan TEMU KERJA TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING “Akselerasi Intervensi Serentak Dalam Percepatan Penurunan Angka Stunting” bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan koordinasi percepatan penurunan stunting antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemangku kepentingan lain (stakeholders) baik tingkat Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, sehingga berfungsi secara optimal dan merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. (Red)

---

## **Bupati Batang Hari Lantik dan Kukuhkan Kepala Desa Penyesuaian Masa Jabatan**

Batang Hari, Jambi – Bupati Batang Hari Muhammad Fadhil Arief melantik Kepala Desa Aur Gading dan mengukuhkan Pengesahan Penyesuaian Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Batang Hari Tahun 2024 bertempat di serambi rumah dinas Bupati Batang Hari, Kamis (27/06/2024).

Bupati Batang Hari menyampaikan dengan penambahan masa jabatan kepala desa semoga RPJMDES dapat diselesaikan dan terlaksana

dengan baik.

Bupati mengucapkan terimakasih kepala desa yang telah bersinergi membangun perekonomian dan pendidikan dimana telah membantu masyarakat dalam meningkat perekonomiannya dan melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih baik.

Bupati berpesan kepada Kepala Desa teruslah melayani masyarakat demi mensejahterakan rakyatnya, dan saling berkoordinasi dengan pemerintah dalam membantu melaksanakan program-program pemerintah kedepannya.

Selamat Kepada Kepala desa yang telah dilantik dan dikukuhkan pada hari ini, semoga silaturahmi yang kita jalin akan mempermudah segala urusan kita. Aamiin

Turut Hadir Ketua TP. PKK Kabupaten Batang Hari Ibu Zulva Fadhil, SE, Kepala OPD terkait, Para camat, Ketua TP. PKK Kecamatan dan para undangan lainnya. (Red)

---

## **Pungutan Dana Alat Marching Band SMK N 4 Jadi Sorotan, LSM Gempita Minta APH Periksa**

Batang Hari, Jambi – Pungutan dana komite SMK Negeri 4 Batang Hari di Kecamatan Maro Sebo Ulu menjadi sorotan publik, pasalnya anggaran yang terkumpul diperkirakan mencapai empat puluhan juta, Kamis (27/06/2024).

Ketua LSM Gempita Batang Hari Miki Lavin mengatakan, dana BOS dan yang sudah terkumpul dari masyarakat tersebut patut diperiksa.

“Kalau kita hitung per siswa dipungut Rp 150.000,00. Jadi, dari seluruh siswa yang ada di SMK 4 itu bisa mencapai empat puluh juta rupiah. Hingga kini realisasinya tidak dipaparkan ke masyarakat,” ungkapnya.

Ia sangat menyesali sikap kepala sekolah bersama pengawas yang menganggap hal itu biasa tanpa memberikan edukasi yang terbuka untuk masyarakat.

“Seharusnya laporan dana BOS wajib di pajang, sama halnya dengan dana yang sudah dikumpul dari orang tua siswa,” jelas ketua LSM Gempita yang akrab di sapa Lavin.

Menurut Lavin, sangat tidak masuk akal jika alat marching band itu mencapai empat puluh juta rupiah.

Sementara itu, Kepala Sekolah SMKN 4 Dewi Suryani saat ditanya mengenai papan informasi dana BOS dan bukti pembelian alat marching band tidak mau menjawab. (Red)

---

## **Batang Hari Merupakan Kabupaten Pertama Penerapan CSIRT di Provinsi Jambi**

Batang Hari, Jambi – Target Pemerintah Kabupaten Batang Hari untuk menjadi yang terdepan di Provinsi Jambi bukan hanya isapan jempol belaka. Berbagai treatment dan upaya mereka lakukan, untuk membuat lebih maju selaras dengan semangat slogan Batang Hari Tangguh. Setelah sebelumnya mengikuti asesmen Smart City di Kota Bali, hari ini Rabu (26/06/2024).

Kembali Kabupaten Batang Hari mencatat sejarah di Provinsi Jambi sebagai Kabupaten yang pertama dalam penerapan Computer

Security Incident Response Team (CSIRT), pengesehan atas penerapan tersebut di tandai dengan penyerahan Sertifikat Tanda Registrasi (STR) CSIRT oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada launching CSIRT yang dilaksanakan di aula BSSN Kota Depok.

Penyerahan STR CSIRT ini dilakukan langsung oleh Kepala BSSN Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian. Pemerintah kabupaten Batang Hari adalah salah satu dari 14 Kabupaten/ Kota se-Indonesia.

Yakni, Kota Pekanbaru, Kota Banjarmasin, Kota Gorontalo, Kota Makassar, Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Belitung, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Boolang Mongondow, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Lamongan.

H.Bakhtiar, SP Kita menyadari di era digitalisasi yang terus berkembang membawa tantangan baru termasuk ancaman -ancaman dalam bentuk serangan Siber yang semakin kompleks dan canggih.

“Atas petunjuk Bapak Bupati kita akan menerapkan CSIRT di Kabupaten Batang Hari dan kita berharap dengan hadirnya CSIRT diharapkan menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas dan keamanan Siber di Kabupaten Batang Hari,” ujar Bakhtiar.  
(Red)

---

**PPID Utama Kabupaten Batang Hari Gelar Pra FGD Terhadap Daftar Informasi Publik yang**

# Dikecualikan

Batang Hari, Jambi – Pejabat Pengelola Infomasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Batang Hari melakukan Pra FGD (forum group discusion) terhadap daftar informasi publik yang dikecualikan pada PPID Pelaksana Pemerintah Kabupaten Batang Hari tahun 2024 berjalan lancar dan sukses bertempat di Ruang COC Dinas Kominfo Batang Hari, Selasa (25/06/2024).

Pada kegiatan tersebut menghadirkan Narasumber Komisioner Komisi Informasi provinsi jambi Ibu Siti Masnidar, Bagian Hukum Setda Batang Hari dan Inspektorat Batang Hari.

Kepala Dinas Kominfo yang diwakili oleh Kabid IKP Rikki Jaya Pratama, S.STP menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada Komisi Informasi Propinsi Jambi yang telah memberikan ruang kepada PPID Utama Batanghari dalam menyelesaikan daftar informasi publik yang dikecualikan dilingkup pemerintah Kabupaten Batang Hari, dan juga berharap dapat memberikan masukan dan saran sebagai langkah awal dalam menetapkan DIK untuk dijadikan keputusan Bupati.

Komisioner Komisi Informasi Propinsi Jambi Siti Mas Masnidar dalam paparannya menyampaikan bahwa daftar informasi yang dikecualikan mengacu kepada Undang-Undang nomor 14 tahun 2008, untuk itu kepada PPID Utama Batanghari khususnya Dinas Kominfo agar cermat dan selektif serta berkoordinasi dengan seluruh PPID Pelaksana dalam melakukan uji konsekuensi. (Red)

---

**Kominfo Batang Hari Raih**

# Apresiasi dari TIM Asesor Smart City

Batang Hari, Jambi – Pemerintah Kabupaten Batang Hari mendapat Apresiasi dari Tim Asesor Smart City Bali-Guna pengembangan kota cerdas (Smart City). Pemerintah Kabupaten Batang Hari mengikuti Asesmen Smart City yang dilaksanakan Kementerian Kominfo di The Meru Sanur Hotel Denpasar Bali, Senin (24/06/2024).

Kegiatan ini diikuti oleh beberapa Kabupaten/Kota yang lolos seleksi Smart City di seluruh Indonesia. Seperti diketahui Pemerintah Kabupaten Batang Hari adalah peserta yang lolos seleksi Smart City pada tahun 2023.

Dalam melaksanakan kegiatan ini, Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PANRB.

Sebanyak 241 Kabupaten/Kota mengikuti kegiatan ini, adalah yang terpilih pada periode 2017-2023, setiap Kabupaten/Kota diberikan kesempatan memaparkan Program Quick Win Smart City yang menjadi fokusnya.

Tim Smart City Kabupaten Batang Hari yang dikomandoi Kadis Kominfo Amir Hamzah, S.E, M.Si memaparkan langsung materi Quick Win andalan Smart City dihadapan para Asesor Bapak Andianto Haryoko, S.T, M.Si, ME, QWP, CIC Perencana Ahli Madya Kementerian Bappenas dan para Asesor lain Farid Subkhan dari City Asia/Perbanas, Wiwin Sulistyو dari Akademisi dan Mardiana Purwaningsi dari Tim Asesor Kementerian Kominfo.

Penyampaian Program Quick Win Batang Hari Tangguh yang dipaparkan antara lain Program Dokter Tangguh dari Dinas Kesehatan, Program Bank Sampah dan Pembuatan Kompos dari Dinas

Lingkungan Hidup, Pelayanan Terintegrasi (Petir) dari Dinas Dukcapil, Sistem Informasi Geografis (SIG) dari DPMPTSP.

Pengembangan UMKM melalui Pusat Oleh-oleh Batang Hari oleh DISDAGKOP UKM, Sistem Informasi Permasalahan Kesejahteraan Sosial (SIPERKASA) dari Dinas Sosial mengenai bantuan jaminan kesehatan sehingga Capaian Universal Health Coverage (UHC) Batang Hari sebesar 99,16%.

Materi yang disampaikan oleh Kadis Kominfo yang didampingi Sekretaris Kominfo Roni, Kabid TIK Boni Bonanza, Sekretaris PUTR Lucky, Kabid Alkal Rikho Putra, Sekretaris LH Faisal, dan Kabid Bapperida Imron, serta Staf Dinas Kesehatan Eka Deviana, mendapatkan apresiasi langsung dari semua Asesor yang melakukan asesmen/evaluasi dan mereka mengapresiasi karena Quick Win tersebut telah berjalan dengan baik di Kabupaten Batang Hari, sehingga dibutuh kesempurnaan dan sentuhan anggaran untuk menjadikannya lebih baik.

Kadis Kominfo Kabupaten Batang Hari yang di wawancara media ini mengatakan, Alhamdulillah dengan support luar biasa Bupati Batang Hari Bapak Mhd. Fadhil Arief, hari ini kami telah selesai menjalani asesmen/evaluasi tahap I Smart City untuk Kabupaten Batang Hari.

“Berkat kerjasama semua OPD progres penerapan Smart City di Kabupaten Batang Hari mendapatkan apresiasi dari para Tim Asesor yang tergabung dari Tim Asesor Smart City Kementerian Kominfo dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk penerapan Smart City di Kabupaten Batang Hari terutama Masyarakat Kabupaten Batang Hari,” tegas Amir. (Red)

---

# Wabup Batang Hari Buka Acara HUT Kecamatan Mersam yang ke 66

Batang Hari, Jambi – Wakil Bupati Batanghari, H. Bakhtiar, S.P., secara resmi membuka acara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-66 Kecamatan Mersam di halaman Kantor Camat, Senin (24/06/2024).

Dalam sambutannya, H. Bakhtiar menyampaikan apresiasinya terhadap kemajuan yang telah dicapai Kecamatan Mersam selama ini.

“Kecamatan Mersam telah menunjukkan perkembangan yang signifikan di berbagai bidang, dan saya berharap momentum ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan,” tuturnya.

Kemudian selanjutnya ia menyampaikan sesuai dengan surat Kementerian Kebudayaan/PDK bersama dengan surat Kementerian Desa akan dibentuk Desa-Desa Budaya.

“Budaya ini adalah menjadi tempat wisata, kita mengangkat budaya itu adalah sungai Batang Hari di seluruh dunia tidak ada nama sungai sesuai nama Kabupaten, dalam artian jaman dahulu transportasi di sungai Batanghari. Tetapi disayangkan duluan orang mengangkat situs candi yang ada di Muaro Jambi, karena monumennya jelas,” ujar H. Bakhtiar.

Rinto Saputra, selaku Camat Mersam menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam acara tersebut.

“Ribuan terima kasih kepada tamu undangan yang telah bersedia hadir untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun Kecamatan Mersam. Kehadiran warga semua sangat berarti bagi kami dan menjadi semangat bagi kami untuk terus bekerja lebih baik lagi,”

ungkap Rinto Saputra.

Acara HUT ke-66 Kecamatan Mersam ini dimeriahkan dengan berbagai kegiatan, termasuk pertunjukan seni budaya, lomba-lomba tradisional. Masyarakat yang hadir tampak antusias mengikuti rangkaian acara yang berlangsung dengan meriah dan penuh semangat kekeluargaan.

Dalam Acara tersebut turut Hadir Ketua Adat Kabupaten Batang Hari/yang mewakili, Forkopincam Mersam, Ketua Adat Kecamatan Mersam, seluruh Kades se-Kecamatan Mersam, para Ketua BPD, da'i, Ketua TP PKK se-Kecamatan Mersam, serta para tamu undangan lainnya. (Red)

---

## **Fadhil Bupati Batang Hari Ikut Serta Rapat Pembahasan RUU Kabupaten Kota di Gedung DPR RI**

Nasional – Hadir digedung Nusantara DPR RI Mhd. Fadhil Arief bersama 26 Kepala Daerah Rapat Dengar Pendapat terhadap pembahasan Rancangan Undang Undang, Senin (24/06/2024).

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal mengatakan pihaknya bersama dengan pemerintah sedang membahas 26 Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota setelah menerima Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari Pemerintah dan DPD RI.

Ia menyebutkan catatan pemerintah terhadap 26 RUU kabupaten/kota berupa dasar hukum, penataan kewilayahan, dan karakteristik daerah. Sedangkan catatan kedua, pemerintah

meminta agar tidak memperluas pembahasan terhadap 26 RUU ini di luar dari perubahan dasar hukum, penataan kewilayahan, dan karakteristik daerah, termasuk tidak membahas masalah kewenangan dan lain-lain, lantaran akan berpotensi bertentangan dengan sejumlah undang-undang.

“Indonesia itu luas, intinya kami bersama dengan pemerintah dan kepala daerah sedang membahas bagaimana idealnya agar nantinya 26 RUU Kabupaten Kota ini sesuai dengan kemauan kita bersama,” kata Syamsurizal dalam Rapat Panitia Kerja dengan Bupati dari 26 Daerah dan Pemerintah, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta

Adapun 26 RUU tersebut untuk tingkat kabupaten meliputi RUU tentang Kabupaten Bintan, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Utara, Batanghari, Kerinci, Merangin, Bengkalis, Indragiri Hulu, Kampar, Lima Puluh Kota, Agam, Padang Pariaman, Pasaman, Pesisir Selatan, Sijunjung, Solok, dan Tanah Datar. Kemudian untuk tingkat kota terdiri dari RUU tentang Kota Jambi, Pekanbaru, Bukittinggi, Padang Panjang, Padang, Payakumbuh, Sawahlunto, dan Solok. Berbagai kabupaten kota tersebut berada di Provinsi Sumatera Barat, Lampung, Jambi, Riau, dan Kepulauan Riau.

Dalam Pembahasan RUU Mhd. Fadhil Arief menyampaikan ucapan terima kasih karena Batang Hari menjadi bagian dari 26 Daerah yang pada hari ini dilaksanakan pembahasannya, “saya sengaja pilih penerbangan pertama demi untuk mengikuti kegiatan ini”.

Lanjut Fadhil, “saya memberi apresiasi bahwa tim ahli DPR-RI sudah datang ke Batang Hari untuk melakukan inventarisasi terhadap masalah dari RUU ini.”

Saya menegaskan bahwa batang hari itu penulisannya terpisah, Batang (spasi) Hari tetap sebagaimana UU No 12 tahun 1956

Dan di jambi itu ada Batang Hari, Batang Tebo, Batang Merangin, Batang Bungo, Batang Asai dan batang itu artinya Sungai.

Kemudian Pasal 5 ayat 1 RUB ada satu Potensi Batang Hari bahwa Batang Hari itu adalah daerah Pertanian dan sekaligus Peternakan dan kami takutkan kalau ini tidak di tuliskan maka RPJMD kami akan salah nantinya sehingga tidak linear dengan Potensi Kabupaten Batang Hari ucapan "Mhd Fadhil Arief Bupati Kabupaten Batanghari.

Ada satu hal yang menjadi permasalahan sebagai informasi dan masukan saja. Batang Hari ini sudah dua kali di mekarkan, dulu batang hari di mekarkan dan di bagi ke Kabupaten Tanjung Jabung namanya pada saat itu. Kemudian di tahun 1999 di mekarkan lagi kabupaten Batang hari menjadi Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Muaro Jambi.

Sebelum mengikuti pilkada tahun 2020 saya adalah Sekda Kabupaten Muaro Jambi yang mana pemekarannya Kabupaten Batang Hari. Pembahasan tentang Batas wilayah di batang hari ini 3 segmen sudah selesai., ujar Mhd. Fadhil Arief di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta. (Red)